

**MODEL PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG
Ade Iskandar, Rahim Doli Patuan Sakti Siregar**

ABSTRACT

Waste and its management are now becoming increasingly pressing problems in cities in Indonesia, because if not done properly handling will result in adverse changes in the environmental balance that pollutes the environment both to soil, water, and air. The problem that often arises for the community is the lack of technical knowledge on how to manage waste or recycle waste. Lack of knowledge about managing waste experienced by the community has resulted in a high and significant buildup of waste. Supposedly, waste management in the world is no longer a new thing that requires attention for every community, moreover the waste generated from the community and indeed should be an obligation for the community itself to manage it in addition to using services from the government. Attitudes and community participation as well as government assistance (technical and non-technical) in various forms are needed to accelerate the development and growth of community-based settlement waste management with the principle of 3 R (Reduced, Reused and Recycled).

The purpose of this study is to find out, analyze, and study how the Waste Management Model in Tulang Bawang District involves community participation so that the waste can be managed properly. In this study the authors used a qualitative data analysis with a descriptive approach, the data collection methods in this study were observation, interviews, and documentation.

In general, the results of this study are as follows : (1) The model of waste management with the principle of 3 R through waste segregation activities is a paradigmatic solution, which is a solution from the paradigm of how to manage waste; (2) Community Empowerment in the role of RT / RW management is very large in helping to realize the program and bridging communication between the local government and the community; (3) The government together with the RT / RW management and management can Participate in providing planned and measurable education to the public about proper waste management.

Keywords: waste, participation, community

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan sesuatu yang tidak di pakai, tidak disenangi sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia tetapi bukan biologis karena kotoran manusia tidak termasuk didalamnya dan umumnya bersifat padat (Azwar, 2002). Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak kota-kota di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan sehingga mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air, dan udara. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Selain itu jumlah sampah terus bertambah

dengan laju yang cukup cepat, sedangkan pengetahuan dan kemampuan dalam sistem teknik pengelolaan persampahan masih belum memadai. Hal ini juga mengakibatkan timbulnya masalah lain, antara lain mempercepat atau menjadi sumber penularan penyakit, bau busuk, tersumbatnya saluran drainase dan aliran sungai. Tidak seimbangny sarana persampahan serta pengelolaan yang tidak baik menjadikan tingkat layanan tidak optimal.

Tingginya permasalahan sampah juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Saat ini salah satu permasalahan sampah yang cukup rumit adalah permasalahan sampah pasar. Hal ini dikarenakan selain adanya jumlah yang relatif banyak, sampah pasar juga memiliki permasalahan sendiri khususnya pada pasar tradisional yang merupakan salah satu wadah perekonomian sebagian besar masyarakat perkotaan. Aktivitas atau kegiatan baik antara jual beli pedagang dengan pengunjung atau pembeli secara tidak langsung dapat menjadikan timbulan sampah pada pasar setiap aktivitas tersebut dilakukan. Seringnya masalah yang timbul bagi masyarakat yaitu tidak adanya pengetahuan tentang teknis bagaimana cara mengelola sampah atau daur ulang sampah. Kurangnya pengetahuan tentang mengelola sampah yang dialami masyarakat mengakibatkan penumpukan sampah yang cukup tinggi dan signifikan. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan karena dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dari pada dampak positifnya. Timbulan sampah terbanyak berasal dari pemukiman, dengan demikian penghasil sampah terbesar adalah rumah tangga. Sampah menjadi permasalahan serius sejalan dengan bertambahnya penduduk dan perubahan pola hidup masyarakat di suatu lingkungan.

Adanya aktivitas yang menyebabkan timbulan sampah setiap hari menjadikan pengelolaan sampah juga sangat perlu diperhatikan. Seharusnya, pengelolaan sampah di dunia bukan lagi menjadi hal yang baru yang membutuhkan perhatian bagi setiap masyarakat, terlebih lagi sampah yang dihasilkan berasal dari masyarakat dan memang seharusnya menjadi kewajiban bagi masyarakat itu sendiri untuk mengelolanya di samping menggunakan pelayanan dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat lebih berperan sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Hampir seluruh kawasan perkotaan di Indonesia masih mengandalkan pemerintah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah. Hal ini terbukti bahwa sampai saat ini masih banyak kawasan perkotaan di Indonesia yang masih mengelola sampahnya dengan sistem angkut-buang yang difasilitasi pemerintah meskipun pada akhirnya tidak seluruhnya sampah-sampah yang dihasilkan diangkut dan dikelola dengan baik (Damanhuri, 2006).

Apabila timbulan sampah yang bersumber dari perumahan dan pemukiman belum teratasi dengan baik, tentunya akan menjadi suatu pencapaian terhadap kondisi lingkungan yang buruk dan berdampak negatif terhadap masyarakat sehingga perlu adanya suatu pengelolaan sampah yang dapat menanggulangi timbulan sampah tersebut. Permasalahan sampah yang sudah terjadi dapat diatasi dengan cara melakukan sistem teknik pengelolaan persampahan secara terpadu dan menyeluruh. Salah satu teknis pengelolaan sampah secara terpadu dan menyeluruh yang dapat dilakukan saat ini adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pertumbuhan volume sampah semakin meningkat setiap tahunnya. kebutuhan akan pelayanan sampah juga meningkat mengikuti jumlah sampah. Jumlah sampah yang terangkut tidak sebanding dengan timbulan sampah.

Persampahan merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan, dimana jumlah penduduk di daerah perkotaan yang cukup banyak dan relatif padat. Selain itu, permasalahan sampah dapat menyebabkan penurunan pada kualitas lingkungan perkotaan karena pengelolaan persampahan yang kurang memadai, oleh karena itu diperlukannya suatu upaya untuk menangani masalah sampah pada perkotaan sehingga tidak akan mempengaruhi kualitas lingkungan perkotaan yang berdampak bagi kesehatan masyarakat. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2017 menghasilkan sampah sekitar 7200 ton per tahun yang perharinya menghasilkan 20- 30 Ton Sampah di Kecamatan Menggala. Diperkirakan hanya sekitar 60 % sampah di Kecamatan Menggala yang dapat terangkut ke TPA (Tempat Pengelolaan Akhir), yang operasi utamanya adalah pengurugan (*landfilling*).

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreaifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah

secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan (Ryaas Rasyid, 2017 : 45).

Menurut Pamudji (2013: 5) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan dapat diawali dengan memberikan dorongan kepada orang agar mau memainkan peran lebih aktif dalam pekerjaannya, sampai pada melibatkan mereka dalam mengambil keputusan atau tanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

2. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut kamus lingkungan sampah diistilahkan sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai dan tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pernakaian barang rusak atau berecat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau dibuang (Yeti, 2002). Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Panji Nugroho, 2013).

Definisi sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sementara menurut Purwendro & Nurhidayat, (2006) sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai.

3. Partisipasi Masyarakat

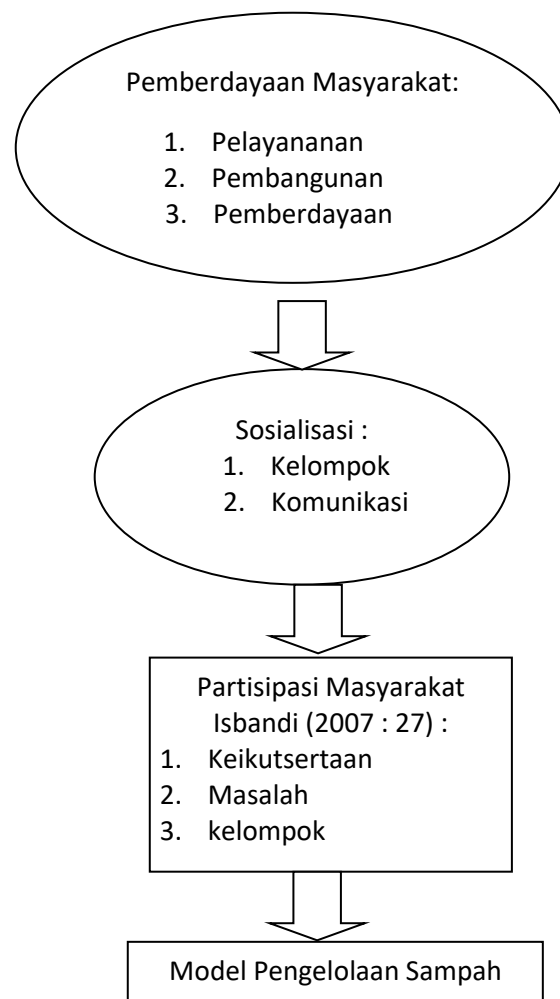
Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (dalam Siti Fatimah, 2012:10) partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di

seleenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2003:17).

4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas dapat disusun gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :



C. METODOLOGI

Menurut Sugiyono (2010: 115) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:116). Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan sampel jika peneliti bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi (Arikunto, 2010:174-175). Sampel dalam penelitian ini adalah_____

Menurut Kriyantono (2012:42), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah sumber data sekunder. Pada penelitian kali ini, yang termasuk dalam data sekunder adalah studi pustaka dari literatur yang menunjang atau berkaitan dengan penelitian ini. Dimana data sekunder ini digunakan untuk membantu menganalisis data primer yang didapatkan di lapangan.

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Ristu Irham	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
2	Erwadi S.	Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	
3	Sudirman	Camat Menggala	
4	Sujono	Ketua RW Menggala 01	
5	Tuty H.	Masyarakat	
6	Meidi	Masyarakat	

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengelolaan Sampah

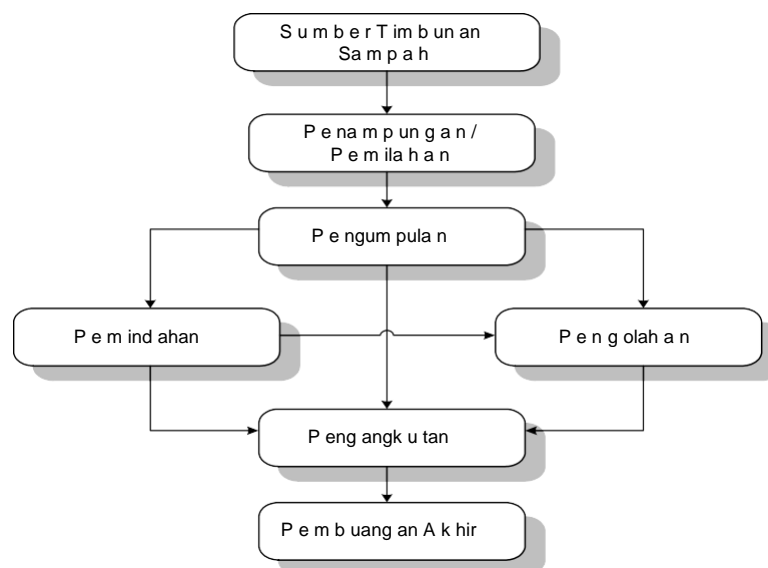
Hasil penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berlangsung di Menggala tercantum dalam tabel berikut ini dan selanjutnya dibandingkan dengan standar Revisi SNI 03 3242 1994 tentang Pengelolaan Sampah di Pemukiman. Dari segi teknis operasional program pengelolaan sampah yang dilakukan di Menggala telah memenuhi standar pengelolaan sampah di pemukiman dengan prinsip 3R.

M Gempur Adnan, Deputy II Bidang Pengendalian Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup, mengatakan sebagai pengganti sistem penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir yang banyak diprotes masyarakat, pemerintah kini

mendorong penerapan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (reuse, reduce, dan recycle) pada skala kota.

Dalam pengelolaan menuju zero waste, proses pemilahan dan pengolahan harus dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah. Pengelolaan sampah diawali dari lokasi timbulan sampah atau produsen sampah. Sampah dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik, dan ditempatkan pada wadah sampah yang berbeda. Sampah organik untuk diproses menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik biasanya dimanfaatkan untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali. Proses selanjutnya baik pengumpulan, pemindahan maupun pengangkutan sampah yang telah terpilah diusahakan jangan tercampur kembali. Upaya ini untuk meningkatkan efisiensi pengolahan sampah. Diagram pengelolaan sampah dapat dilihat pada gambar 4.2

Gambar 4.2.
Proses Pengelolaan Sampah .



Sumber : DLH Kabupaten Tulang Bawang

2. Sarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah suatu tempat penampungan yang terdiri dari container maupun Transfer Depo (TD). Jumlah TPS yang terdiri dari container dengan kapasitas 6-14 m³ sebanyak 8 buah pada tahun 2010 termasuk kontainer kapasitas 1 m³, sedangkan Transfer Depo (100 – 200 m³) ada 8 buah, yang tersebar diseluruh wilayah

Kabupaten Tulang Bawang. Banyaknya pembuangan sampah di luar kontainer (TPS) menunjukkan indikasi bahwa jumlah TPS yang tersedia di suatu wilayah kurang mencukupi. Berdasarkan hasil penelitian, distribusi jawaban responden menunjukkan bahwa dari 10 responden yang memberikan jawaban terdapat: 7 menyatakan memadai, 3 menyatakan tidak memadai, karena itu perlu penambahan TPS-TPS, khususnya di wilayah-wilayah yang mempunyai produksi sampah tinggi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sampah-sampah yang dikumpulkan di TPS (container) berserakan di luar kontainer, menunggu sampai diangkut truk.

TPS-TPS ini harus selalu dikontrol oleh pihak pengawas intern karena seringkali masyarakat disekitar wilayah TPS maupun yang melintas di TPS mengeluh karena keterlambatan pengangkutan mengakibatkan sampah bertebaran dan menimbulkan bau busuk yang tidak menyenangkan. Dikhawatirkan akan dapat menimbulkan penyakit menular. Dampak membusuknya sampah di TPS tersebut mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat didokumentasikan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang pengaruh TPS terhadap Kesehatan masyarakat sebagai berikut 8 orang menyatakan mempengaruhi, 2 orang tidak mempengaruhi. Pembusukan sampah ini sering ditemui di TPS jalan depan Pasar Kabupaten, dan jalan belakang pasar Unit 2, karena itu perlu penambahan TPS sesuai dengan permintaan masyarakat. Yang dimaksud bukan hanya container nya tetapi juga lahan atau tanah tempat TPS itu perlu pengadaannya. Karena sebagian besar masyarakat menolak atau tidak mengizinkan tanah pekarangannya dijadikan tempat pembuangan sampah (TPS). Jadi Pemda perlu memikirkan dan mengalokasikan dana untuk kepentingan umum pengadaan lahan tanah untuk TPS.

b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat pengelolaan dan pemusnahan sampah terakhir kalinya, di TPA inilah sampah dipilah menjadi beberapa bagian, yaitu sampah organik dijadikan kompos, sampah anorganik dijadikan bahan daur ulang *Recycling*, dan sampah yang mengandung B3 dari rumah sakit dibakar dalam incinerator (*incinerating system*) atau ditimbun dalam tanah (*land field control system*), sehingga tidak memungkinkan untuk timbulnya wabah penyakit.

TPA pada umumnya berupa tumpukan sampah di atas tanah terbuka dan berlokasi jauh dari pemukiman penduduk ($\pm 300m$). Dinas Kebersihan saat ini memiliki dua TPA yang terletak di Barat Kabupaten Tulang Bawang, dengan luas $\pm 16,8$ Ha, dengan jarak dari inti Kabupaten Tulang Bawang 15 Km. TPA ini dioperasikan pemakaiannya sejak bulan Juli tahun 2007 oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Tulang Bawang. Sistem yang dipakai dalam

pembuangan akhir sampah ini adalah *Open Dumping* artinya sampah diletakan saja di atas tanah terbuka. Selain itu sistem ini juga dipergunakan *Sistem Controlled Land Field* yang artinya sampah yang telah penuh ditutup/ditimbun dengan tanah dan kemudian diratakan kembali. Sistem ini dipakai untuk menimbun limbah B3 dari rumah sakit dikarenakan incinerator yang ada tidak dapat mengolah. Disamping kapasitasnya sangat minim, biaya operasinya juga sangat tinggi. Lokasi penampungannya juga disediakan untuk menampung sampah yang berasal dari bagian kabupaten Tulang Bawang atau wilayah operasional I, II, III dan IV. Saat ini kondisi TPA ini sangat memprihatinkan karena telah terpakai 75% dari lahan keseluruhan, dan lahan tersebut tidak memiliki jalan operasi/lingkar, sehingga lokasi yang belum tertimbun sukar dijangkau truk.

Adapun kendala lain di TPA yaitu berupa: (1) tidak adanya jalan operasi, sehingga kemampuna TPA belum dapat dioptimalkan, jalan operasi ini berguna untuk menjadi lintasan truk samoah untuk sampai pada lokasi TPA yang belum tertimbun sampah, (2) Kurangnya alat berat untuk pemaparan sampah di tempat pembuangan akhir menjadi kendala yang cukup berpengaruh. Alat berat yang dimaksud adalah Wheel loader, Buldozer dan Backhoe. Pada awalnya ada 3 alat berat tersebut tetapi dikarenakan perawatan yang kurang dan ketidaktanggapan Dinas mengganti suku cadang sehingga yang beroperasi sekarang bulldozer 1 unit, Wheel loader 1 unit, *Backhoe* atau *exavator* 1 unit. Dan diperkirakan untuk kedua TPA tersebut dibutuhkan tambahan bulldozer 2 unit, whel loader 1 unit, dan excavator 1 unit.

3. Problematika Model Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka dapat diketahui beberapa problematika dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah Menggala, antara lain:

- a. Berdasarkan pengalaman pengurus RT/RW dan pengelola sampah, hal yang paling sulit dalam implementasi Model pengelolaan sampah berupa kegiatan pemilahan sampah adalah bagaimana mengubah paradigma masyarakat dari “**membuang sampah**” menjadi “**memanfaatkan sampah**”. Perubahan ini penting karena akan mengubah persepsi masyarakat bahwa sampah bukanlah sesuatu yang harus dibuang, tetapi justru dapat dimanfaatkan.
- b. Pemerintah Daerah belum memberikan apresiasi terhadap kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan oleh pengelola akan mempengaruhi motivasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemilahan sampah. Masyarakat merasa seolah-olah sama saja antara mereka yang sudah memilah sampahnya dengan yang belum memilah sampahnya.

- c. Tidak ada mekanisme dan person yang memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
- d. Kebijakan penerapan pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R tidak diikuti ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang.
- e. Problematika dalam pengelolaan dan teknis operasional yang banyak ditemui, terutama di awal pelaksanaan program adalah masalah pemilahan sampah di rumah tangga, yaitu pemilahan sampah yang dilakukan terkadang masih kurang tuntas. Artinya masih ada sampah organik dan anorganik yang terbuang ke tong sampah campursari. Akibatnya ada sampah, baik organik maupun anorganik, yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan, akan tetapi justru ikut terbuang bersama sampah campursari. Secara umum, problematika tersebut senantiasa akan timbul selama proses pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah tersebut dilakukan. Sehingga yang diperlukan kemudian adalah edukasi yang terus menerus, baik dalam keluarga maupun secara kolektif. Di sinilah peranan pengelola dan pengurus RT/RW serta ibu-ibu di rumah sangat dituntut untuk terus aktif menggalakkan pengelolaan sampah yang benar.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang Model Pengelolaan Sampah, Studi Kasus di Kabupaten Tulang Bawang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Model Pengelolaan Sampah Rumah di Kabupaten Tulang , telah berhasil dilaksanakan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui proses pemilahan sampah dan Berbasis Masyarakat. Model yang diterapkan mampu mereduksi volume sampah yang dibuang hingga 70%.
2. Faktor Penghambat dari penerapan model ini adalah pada soal bagaimana merubah paradigma dari membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah. Peran pengurus RT/RW sangat besar dalam membantu mewujudkan program dan menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat karena masi ada beberapa masyarakat yang belum terlibat aktif dalam penerapan model ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan walaupun telah berhasil menemukan manfaat yang besar dari kegiatan pemilahan sampah, yaitu mampu mereduksi sampah yang

dibuang , namun penelitian yang dilakukan masih terbatas. Sehingga untuk dapat menjadi rumusan model pengelolaan sampah yang lebih aplikatif membutuhkan kajian lebih lanjut yang lebih komprehensif.

2. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah memberikan acuan yang jelas mengenai paradigma baru pengelolaan sampah. Yang terpenting kemudian adalah implementasi dalam bentuk Perda, yang diamanatkan paling lambat 3 tahun setelah UU tersebut terbit. Sehingga paradigma baru dalam pengelolaan sampah dapat menjadi gerakan masyarakat dan dapat menjadi salah satu solusi masalah persampahan di masa mendatang.
3. Pemerintah bersama dengan pengurus RT/RW dan pengelola memberikan edukasi kepada masyarakat secara terencana dan terukur tentang pengelolaan sampah yang benar. Manfaat pengelolaan sampah menjadi salah satu materi yang ada dalam setiap kegiatan edukasi kepada masyarakat. Ibu rumah tangga menjadi ujung tombak dalam edukasi pengelolaan sampah di rumah tangga.
4. Pemerintah mengatur dan memberikan insentif & disinsentif.. Insentif diberikan untuk memotivasi masyarakat agar bersemangat melakukan pemilahan sampah. Insentif yang diberikan dapat dalam bentuk pengurangan retribusi bagi warga masyarakat yang melakukan pemilahan sampah.
5. Pemerintah, pengurus RT/RW dan pengelola membuat sistem/mekanisme dan menentukan orang untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk menjamin keberlangsungan program.
6. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan model yang dianut. Selain itu pemerintah memfasilitasi sosialisasi implementasi model pengelolaan sampah, baik berupa penyediaan sarana dan prasarana, maupun kesempatan untuk melakukan studi banding ke daerah yang sudah berhasil melaksanakan pengelolaan sampah dengan benar.
7. Pengelola bersama-sama dengan pengurus RT/RW membuat membuat strategi untuk mengkader orang-orang yang nantinya diharapkan akan menjadi pengelola yang memiliki kapabilitas dan integritas. Model layak diaplikasikan sebagai pilihan model pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan dengan prinsip 3R. Adapun mekanisme implementasinya melalui tahap perencanaan, implementasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Firmansyah, M. A. 2013. *Clinical Approach and Management of Chronic Diarrhea. The Indonesian Journal of Internal Medicine*. 45 (2).
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Adisasmata R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar,A. 2002. Pengantar Epidemiologi. Penerbit Binarupa Aksara. Edisi Revisi. Jakarta Barat.
- Cipta Karya. 1993. Masalah Perumahan dan permukiman. Bandung.
- Damanhuri, E. 2010. Diktat Pengelolaan Sampah. Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB).
- Damanhuri, Enri dan Padi, Tri 2006. Pengolahan Sampah. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Fatimah, Siti. 2012. Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Ektp di Desa Taratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Uin Suska Riau, Pekanbaru.
- Gunawan Pamudji, dkk. 2013. Pengaruh Perilaku Kerja, Lingkungan Kerja, dan Interaksi Sosial Terhadap Kepuasan Kerja dengan Motivasi Sebagai Variabel Pemediasi (Studi pada Staf Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali).
- Hafifah SJ Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Holil, Soelaiman. 1980. Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung:Pustaka Prima.
- Ife, Frank Teroriero. 2006. Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era. Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, J dan Tesoriero. 2008. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian Pekerja Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2011. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tempat Pembuatan Kompos (TPK) Sarimukti Jawa Barat. Bandung.
- Kriyantono, Rachmat. 2012. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana.
- Kutut Suwondo. 2002. *Civil Society Diaras local* ,Universitas Satya Wacana.
- Lisdiana. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana PadaPukesmas Parit Haji Husein II Kecamatan Pontianak. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Tangjungpura.
- Margaritha Kainama. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Miles, Matthew B; Huberman, A Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nathaniel, Nicky. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham (Studi Pada Saham-saham Real Estate and Property di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2006). Program Studi Magister Manajemen. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Nugroho, Panji, 2013. Panduan Membuat Kompos Cair. Jakarta: Pustaka baru Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Purwendro, S., Nurhidayat. 2006. Mengolah Sampah untuk Pupuk Pestisida Organik. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Siti Irene Astuti. 2009. Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan. Yogyakarta:UNY.
- Su'adah. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Program Corporate Social Responsibility. Jurnal FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 13 No. 2.
- Subagyo, P Joko. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung : Alfabeta.
- Sumampouw, Monique. 2004. Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.
- Sumartiningsih, Agnes (ed). 2000. Sosiatri, Ilmu dan Metode. Yogyakarta.
- Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Kementerian Lingkungan Hidup.
- Yunita, Komang Elsy. 2016. Pengaruh Pengalaman Kerja dan Penempatan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan. Singaraja:Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.4.